



**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

PERUBAHAN

RENCANA

KERJA

CPRENJAD 2021

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (BPKPAD)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (BPKPAD)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021**

PERUBAHAN RENCANA KERJA OPRENUJAD 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERJALAN.....	 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun Berjalan.....	9
2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.....	20
2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.....	21
2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.....	21
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan.....	21
2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.....	21
2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.....	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 Kajian Tentang Capaian Kinerja Pelayanan.....	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.3.1 Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapai.....	27
2.3.2 Tantangan Dan Peluang Untuk Meningkatkan Kinerja Ke Depan.....	27
2.3.3 Program Dan Kegiatan Prioritas Pada Tahun Yang Direncanakan.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	45
2.5.1 Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.....	45
2.5.2 Proses Perencanaan Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Dan Aset Daerah.....	45
2.5.3 Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan.....	46
2.5.4 Permasalahan Dan Solusi.....	46

BAB III RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH.....	48
3.1 Program Dan Kegiatan....	48

BAB IV PENUTUP.....	58
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

•

DAFTAR TABEL

	Halaman
<p>Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Target Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.....</p>	12
<p>Tabel 2.2 Indikator Dan Target Kinerja OPD Serta Indikator Dan Target Kinerja Program Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.....</p>	14
<p>Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Dan Target Kinerja Kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.....</p>	17
<p>Tabel 2.4 Program Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Dimuat Dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra Tahun 2016-2021 dan RKPD Serta Renja Tahun 2016 s/d Triwulan III 2021.....</p>	29
<p>Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan III Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2021.....</p>	34
<p>Tabel 3.6 Rumusan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021.....</p>	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya manusia. Untuk menyelenggarakan pembangunan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dalam rangka keseimbangan kemajuan antar daerah maka perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan demikian sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerahnya baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya.

Amanah otonomi daerah dimaksud disamping merupakan kesempatan bagi daerah untuk dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya secara efektif dan efisien sekaligus menjadi tantangan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan efisien serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan ke masyarakat.

Untuk lebih mensinkronkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan antar Pelaku Pembangunan dan antar Fungsi Pemerintahan agar terarah, terpadu, menyeluruh dan

berkelanjutan maka di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diatur bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) dan berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berpedoman pada peraturan ini bahwa tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) diatur pada Pasal 125 pada Pasal 125 sampai Pasal 143 dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan Renja-PD, Penyusunan Ranwal Renja-PD, Penyusunan Rancangan Renja-PD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD dan Penetapan Renja-PD. Sedangkan tata cara penyusunan perubahan Rencana Kerja dengan tahapan Rancangan Perubahan Renja-PD setelah diverifikasi menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Renja-PD yang diatur pada Pasal 360 sampai Pasal 368.

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun berjalan, senantiasa terus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan capaian sasaran indikator kinerja, pertimbangan kemampuan ketersediaan pendanaan serta kajian dan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya ataupun yang sedang terjadi

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penyesuaian penyusunan rencana program dan kegiatan yang dibutuhkan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dengan melalui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi serta capaian sasaran indikator kinerja yang telah dihasilkan. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Akhir P-Renja) Tahun Anggaran 2021 dan setelah melalui verifikasi dari Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan menjadi Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2021, dimana terlebih dahulu harus melalui penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rancangan P-Renja) Tahun Anggaran 2021 dengan tetap mengaju kepada upaya-upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan telah ditetapkan.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahun Tahap III (Ketiga) Tahun 2016-2021 adalah :

Visi

“Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Misi ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan sasaran kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”

• Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus memfokuskan program dan kegiatannya dalam tatakelola keuangan, peningkatan pendapatan dan tatakelola aset daerah yang akuntabel, berkesinambungan maju yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, berkesinambungan berlandaskan agama dan budaya guna mencapai visi dan misi kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 241);
25. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016–2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 686);
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1016)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
37. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tanggal 3 September 2021 Berita Daerah Nomor 1017.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P. Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai tahap akhir untuk memuat pedoman dalam melaksanakan perubahan program kegiatan sekaligus sebagai alat ukur penilaian dan evaluasi tentang capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 ini selain untuk tahapan akhir agar terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan terpadu penyusunan perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar Fungsi Pemerintahan, antar Pelaku Pembangunan maupun antar Daerah dan secara khusus juga bertujuan agar lebih optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan tanggap terhadap perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun Berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun Berjalan

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 memuat rencana rancangan perubahan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka terwujudnya visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang disesuaikan dengan fungsi dan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 pada Perubahan RKA triwulan III TA 2021, bila didasarkan terhadap Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 melaksanakan 1 (satu) urusan keuangan, 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - (8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (2) Pengadaan Mebel
 - (3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - (1) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - (2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - (3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - (4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - (6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - (7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - (8) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - (9) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - (1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - (2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - (4) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - (1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - (2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - (4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - (2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - (3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - (2) Inventarisasi Barang Milik Daerah

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - (1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - (2) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator dan Target Kinerja Utama diselenggarakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Rumus / Formulasi Perhitungan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4						5	6
1	Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)	45,79	44,01	35,59	34,44	34,02	33,92	33,02	Belanja Langsung APBD dibagi Total APBD x 100%	
2	Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	10,04	7,38	6,00	6,10	6,17	6,47	6,60	Realisasi PAD dibagi Total Pendapatan x 100%	
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penilaian BPK	
4	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	93,07	93,39	93,71	94,03	94,36	94,68	95,00	Realisasi Belanja dibagi Anggaran Belanja x 100%	
5	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	111,08	94,00	94,80	95,60	94,40	97,20	98,00	Realisasi PAD dibagi Target PAD x 100%	
6	Peningkatan PAD (%)	14,40	-17,09	-20,62	5,39	5,94	9,31	6,03	{PAD tahun sekarang dikurang PAD tahun sebelumnya} dibagi PAD tahun sebelumnya x 100%	
7	Dana Perimbangan yang Terserap Dibanding Rencana (%)	95,95	96,00	96,33	96,67	97,00	97,67	97,00	Dana Perimbangan yang Terserap dibagi Rencana Dana Perimbangan x 100%	
8	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	110,18	104,93	91,76	94,68	98,53	101,34	103,26	Belanja Publik (meliputi Belanja Operasi di Luar Gaji, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga) dibagi Total Dana Alokasi Umum (DAU) x 100%	
9	Rasio SILPA Terhadap Total	6,28	1,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	SILPA dibagi Total	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Rumus / Formulasi Perhitungan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4					5	6
	Pendapatan (%)								Pendapatan x 100%
10	Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Jumlah Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)
11	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)

Indikator dan Target Kinerja OPD serta Indikator dan Target Kinerja Program yang diselenggarakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja OPD serta Indikator dan Target Kinerja Program Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA OPD		TARGET KINERJA OPD						Program	Indikator Kinerja Program		TARGET KINERJA PROGRAM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2						3	4		5					
1	Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)	44,01	35,59	34,44	34,02	33,92	33,02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)	44,01	35,59	34,44	34,02	33,92	33,02
2	Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	7,38	6,00	6,10	6,17	6,47	6,60		2	Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	7,38	6,00	6,10	6,17	6,47	6,60
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Opini Penilaian)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Opini Penilaian)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	93,39	93,71	94,03	94,36	94,68	95		4	Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	93,39	93,71	94,03	94,36	94,68	95
5	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	94,00	94,80	95,60	94,40	97,20	98,00		5	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	94,00	94,80	95,60	94,40	97,20	98,00
6	Peningkatan PAD (%)	17,09	-20,62	5,39	5,94	9,31	6,03		6	Peningkatan PAD (%)	-17,09	-20,62	5,39	5,94	9,31	6,03
7	Dana Perimbangan yang Terserap Dibanding Rencana (%)	96	96,33	96,67	97	97,67	97		7	Dana Perimbangan yang Terserap Dibanding Rencana (%)	96	96,33	96,67	97	97,67	97
8	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	104,93	91,76	94,68	98,53	101,34	103,26	8	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	104,93	91,76	94,68	98,53	101,34	103,26	
9	Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)	1,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	9	Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)	1,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	

INDIKATOR KINERJA OPD	TARGET KINERJA OPD						Program	Indikator Kinerja Program		TARGET KINERJA PROGRAM					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2						3	4		5					
10	Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		10	Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu (%))	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		11	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu (%))	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menjabarkan tugas dan fungsinya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Aparatur BPKPAD yang memiliki kompetensi dibidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional (orang)	400,00	320,00	300,00	320,00	400,00	400,00
								2	Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 Tahun 2016 (%)	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

INDIKATOR KINERJA OPD		TARGET KINERJA OPD						Program	Indikator Kinerja Program		TARGET KINERJA PROGRAM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2						3	4		5					
									1	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti dilkat kepemimpinan sesuai dengan eselon (%)	16,6	17,5	21,2	32,46	47,38	69,76
								Program Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Hari Besar Daerah	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk (perseribu penduduk)	3,00					
									2	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)	10,00					
									3	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari-Hari Besar Keagamaan (%)	61,67					
								Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk (perseribu penduduk)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
									2	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
									3	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari-Hari Besar Keagamaan (%)		68,35	65,00	66,67	68,33	70,00
	Tertaksananya pengelolaan keuangan berbasis akrual(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TERGET KINERJA KEGIATAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3					
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah raperda/ perda tentang APBD (Jenis)	5	5	5	5	5	5
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rnperbup/Perbup tentang Penjabaran APBD (jenis)	4	4	4	4	4	4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah raperda/ perda tentang Perubahan APBD (Jenis)	5	5	5	5	5	5
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Rnperbup/Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (jenis)	6	6	6	6	6	6
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen).	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dokumen)	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah serta pengembangannya (sistem aplikasi)	1	1	1	1	1	1
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersosialisasikannya peraturan pengelolaan keuangan kepada Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan (orang)	0	181	181	181	181	181
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Jumlah dokumen aset daerah (jenis)	5	5	5	5	5	5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah laporan tentang pendapatan asli daerah (laporan)	2	2	2	2	2	2
	Jumlah penerbitan surat terhadap target PAD (Jenis)	3	3	3	3	3	3
Penatausahaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	Jumlah daftar SPD dan daftar pelaksanaan APBD (jenis)	2	2	2	2	2	2
Pengelolaan Pengadministrasian Kas Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran bulanan (laporan)	2	2	2	2	2	2
Pendukung Kegiatan Belanja Pegawai dan Pengelolaan Gaji	Jumlah daftar yang merupakan pendukung dalam pengelolaan gaji (jenis)	8	8	8	10	10	10
Penyusunan dan Penelitian DPA – SKPD	Jumlah DPA se-Kab. Tapanuli Selatan (dokumen)	48	48	49	47	47	48
Penyusunan dan Penelitian DPPA – SKPD	Jumlah DPPA se-Kab. Tap Selatan (dokumen)	48	48	49	47	47	48
Penyusunan Realisasi Pengeluaran Belanja Langsung	Jumlah jenis berkas pendukung terhadap belanja langsung (jenis)	15	15	15	15	15	15

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TERGET KINERJA KEGIATAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3					
Bimbingan, implementasi dan asistensi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SKPD yang didampingi dalam migrasi data sistem informasi anggaran daerah (SKPD)	45	45	46	46	46	46
Bimbingan dan Asistensi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah peserta yang mendapat bimbingan dan asistensi penerapan standar akuntansi (orang)	91	91	93	92	92	92
Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi tentang Penatausahaan Keuangan Daerah (orang)	134	134	137	137	137	137
Penyusunan Dokumen dan arsip data komputer informasi keuangan daerah	Jumlah Laporan Data Informasi Keuangan Daerah untuk Kementerian Keuangan (laporan)	9	9	9	9	9	9
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset/Barang/ Milik Daerah	Tersedianya sistem aplikasi tentang Informasi Manajemen Barang Daerah dan pengembangannya (sistem aplikasi)	1	1	1	1	1	1
Verifikasi Piutang Tunggakan PBB-P2 dan Pemutakhiran NJOP	Jumlah dokumen tentang Piutang Tunggakan PBB-P2 dan Pemutakhiran NJOP (dokumen)	1	0	0	0	0	0
Validasi Potensi PBB-P2	Jumlah dokumen validasi potensi PBB-P2	1	0	0	0	0	0
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua kerjasama dengan BPKP	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Daerah (sistem aplikasi)	1	1	1	1	1	1
Lanjutan Pemutakhiran Data Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan tentang Pendataan dan Penetapan Objek Pajak /Wajib Pajak PBB dan Buku NJOP PBB (laporan)	0	2	2	2	2	2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim (surat)	1500	1550	1600	1650	1700	1750
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Pembayaran biaya pindah kantor (kali)	1	1	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan roda 4 (unit)	4	7	8	8	9	9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Cetak Karcis, Belangko atau Formulir sebagai media bukti Surat Setoran atau Surat Pembayaran serta berbagai Cetak Pelengkap Administrasi lainnya (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya alat-alat rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TERGET KINERJA KEGIATAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya langganan surat kabar (terbitan)	34	34	34	34	34	34
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (kotak)	850	850	850	850	850	850
	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu (Orang)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	415	500	500	500	500	500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	160	160	165	165	165	165
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Pelayanan Jasa PNS/ Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (orang)	44	45	45	45	45	45
Pengadaan Kenderaan dinas/ Operasional	Terlaksananya pengadaan kenderaan dinas roda 4 (unit)	0	2	0	0	1	0
	Terlaksananya pengadaan kenderaan dinas roda 2 (unit)	1	4	0	0	2	0
Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Kebutuhan mebeleur kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12
Pembangunan Kelengkapan Fasilitas Gedung Kantor	Terpenuhinya kelengkapan fasilitas gedung kantor (bulan)	12	12	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas Operasional	Terpeliharanya kenderaan dinas roda 4(unit)	4	7	8	8	9	9
Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Perkantoran	Terpeliharanya taman BPKPAD (bulan)	0	12	12	12	12	12
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan pakaian bernuansa daerah yang diadakan (stel)	77	62	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian bernuansa daerah (orang)	0	98	100	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	11	10	10	10	10	10
Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (kali)	1	-	-	-	-	-

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TERGET KINERJA KEGIATAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3					
Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (kali)	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP BPKPAD (dokumen)	1	1	1	1	1	1
	Tersusunnya laporan Capaian kinerja BPKPAD (laporan)	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kab. Tap Selatan (dokumen)	2	2	2	2	2	2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKPAD (dokumen)	1	1	1	1	1	1
Penyusunan Rencana Kerja Program Tahunan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran BPKPAD	6	6	6	5	5	5
Penyusunan Pelaporan Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	Tersusunnya SPJ Bulanan BPKPAD (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyusunan Pelaporan Keuangan Pengeluaran Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Tersusunnya Laporan Keuangan Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (bulan)	12	12	12	12	12	12
Penyusunan Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas	Tersusunnya Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas (bulan)	12	12	12	12	12	12

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Secara umum realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah pada kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah, dimana kegiatan untuk penilaian zona nilai tanah belum dapat direalisasikan karena kesibukan kerja pihak BPN Kabupaten Tapanuli Selatan (Personil BPN Kabupaten Tapanuli Selatan difokuskan pada pensertifikatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten lainnya) dan untuk kegiatan pensertifikatan tanah telah diajukan permohonan dan berkas pensertifikatan ke BPN Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 176 persil, tetapi surat perintah setor (STS) yang diterbitkan pihak BPN Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sekitar 15 persil sehingga realisasi anggaran masih rendah.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 secara umum realisasi Program/ Kegiatann telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Secara umum realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/ keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah tidak ada.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan

Secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihinya target yang direncanakan belum ada karena realisasi semua program dan kegiatan masih berjalan seperti yang direncanakan.

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Tercapainya capaian Program Renstra mengakibatkan terjadinya implikasi keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disebabkan semua kegiatan memiliki efisien alokasi dan ada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang memiliki kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal/ over target, sehingga Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dikatakan tercapai terutama dalam meraih Opini BPK terhadap Laporan Keuangan mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2012-2013 masih meraih Wajar

Dengan Penilaian (WDP) dan Tahun 2011 mendapat opini Disclaimer. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda Terbaik dalam Kemandirian Fiskal Tahun 2018. Tahun 2019 juga memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda terbaik dalam Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun. Tahun 2020 mendapat penghargaan atas Capaian Opini WTP 5 (lima) kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 s/d 2019.

Sedangkan implikasi kegagalan dalam pelaksanaan pada dasarnya tidak ditemukan saat ini, namun dalam konteks benefit dan impact dirasakan pada masa yang akan datang, begitu juga dalam hal pencapaian sasaran dan tujuan misalnya dengan tercapainya opini WTP Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Dalam pelaksanaan kebijakan ataupun tindakan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut

- a. Memperkuat ketersediaan data, informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- b. Memperbanyak forum-forum koordinasi yang dapat mendukung penyusunan dokumen pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- c. Membangun kerjasama yang kuat dengan instansi pemerintah lainnya terutama dari lingkungan kecamatan, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menjaring wajib pajak guna meningkatkan pendapatan daerah, membentuk sumber daya (aparatur) tentang penyusunan dokumen keuangan dan aset daerah.
- d. Menambah jumlah aparatur di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan mengurangi jumlah aparatur yang tidak berkompetensi.
- e. Efisiensi penggunaan dana dalam setiap kegiatan sehingga produktifitas aparatur dapat ditingkatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- f. Memperbanyak alat pendukung pelaksanaan kegiatan berupa peralatan komputer jenis laptop dan perangkat lunak lainnya, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran.
- g. Menggunakan sistem dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- h. Penajaman Program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi daerah, Bupati dan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Kajian Tentang Capaian Kinerja Pelayanan

Dalam kajian tentang capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan berdasarkan indikator lainnya antara lain

1. Simakda (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) sejak Tahun 2010 telah dikelola oleh SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yang ditangani oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simakda berguna untuk penatausahaan keuangan daerah untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan.
2. Mulai Tahun 2011 telah dilakukan kerjasama dengan pihak Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan dalam hal proses Pencairan Dana. Dimana pada saat proses pencairan dana SKPD ataupun Pihak Ketiga dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung ke buku rekening pihak yang tercantum di SP2D (tanpa mempergunakan cek lagi). Hal ini berguna untuk menyesuaikan SP2D yang dikeluarkan dengan pagu dana yang tersedia sehingga mempermudah dalam hal pengelolaan penatausahaan pengeluaran keuangan daerah serta mempermudah proses pencairan.
3. Mulai Tahun 2014 Kuasa BUD telah bekerjasama dengan Bank Sumut tentang kemudahan dalam pelayanan pencairan SP2D yaitu melalui Interface Cash Management System (CMS) yang pelaksanaannya online ke PT. Bank Sumut hingga pemohon dana berurusan dengan bank hanya untuk mencairkan dana yang dimohonkan.
4. Tahun 2012 MOU untuk kerjasama E-Audit BPK sudah ada yang diperkirakan pelaksanaannya efektif dilakukan Tahun 2013 dan terus dilanjutkan / ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 MOU tidak berlanjut.
5. Bagian Gaji telah menjalin kerjasama dengan pihak PT. Taspen Tahun 2012 dengan tujuan untuk pengelolaan pembuatan Aflikasi Gaji PNSD dan Taspen dan mulai efektif Tahun 2013 dan terus dilanjutkan / ditingkatkan dan pada tahun-tahun berikutnya.
6. Tahun 2012 jaringan untuk SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) yang bertujuan untuk penatausahaan barang / aset milik daerah telah ada tetapi masih belum dapat beroperasi dengan maksimal karena lemahnya sistem yang dimiliki sehingga diperlukan perbaikan dan diperkirakan akan berjalan dengan baik Tahu 2015.
7. Tahun 2012 dan Tahun 2013 telah dilakukan pengadaan alat SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) dan Pengadaan Jasa Konsultasi SISMIOP yang pelaksanaannya efektif Tahun 2014.
8. Sistem Informasi Akutansi Daerah dipersiapkan untuk berbasis akrual dan diperkirakan efektif Tahun 2015 untuk SIMAKDA akrual dan SIADINDA akrual dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tenaga konsultan).

9. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) mulai dilaksanakan Tahun 2014.
10. Sistem Informasi Persediaan Barang (SIMPERBA) diperkirakan mulai berlaku Tahun 2014.
11. Sistem Informasi Transfer Daerah (SIMTRADA) yang merupakan penatausahaan penerimaan dana transfer pusat.diperkirakan mulai efektif Tahun 2014.
12. Tahun 2013 Komandan SIKD (Komunikasi Manajemen Data Nasional Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang merupakan rekonsiliasi data dari SIADINDA dan SIMAKDA secara nasional
13. Tahun 2014 Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi Daerah (SIPRIDA) yang merupakan rekonsiliasi data SIMPATDA secara nasional.
14. Tahun 2014 Penyampaian Data Informasi Gaji dan Tabungan Asuransi (PANDITA) PNSD yang merupakan rekonsiliasi dari SIMTRADA secara nasional.
15. Tahun 2016 dimulai penerapan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Dana Transfer dan Indikasi Kebutuhan Daerah (Simpatik)
16. Tahun 2016 Komandan SIKD di Upgrade dan di migrasi menjadi Aplikasi Sinergi (Sistem Informasi Berbasis Teknologi) SIKD dengan penambahan feature dan perbaikan bug pada aplikasi sebelumnya.
17. Tahun 2017 dilakukan perekrutan Tenaga Programmer guna membangun Aplikasi Keuangan Daerah secara mandiri (sebelumnya menggunakan tenaga konsultan). Sehingga terbangun sebuah aplikasi berbasis online yang diberi nama SITARIDA (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi Daerah).
18. Tahun 2017 dimulai proses pengintegrasian terhadap Aplikasi SIMPERBA ke dalam aplikasi SIMBADA.
19. Tahun 2017 dimulai implementasi penginputan data RKA berdasarkan SSH (Satuan Standar Harga) pada SITARIDA.
20. Tahun 2017 diimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional (SIM JKN) yang membantu operator FKTP dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
21. Tahun 2018 mulai Implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (SI-BOS) yang memuat feature perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagai penerima BOS.
- 22 Tahun 2018 diimplementasikan Aplikasi E-Order yang merupakan Jembatan Integrasi Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SITARIDA) dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) dalam hal penatausahaan belanja yang berkaitan dengan Aset Lancar dan Aset Tetap.

23. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten/ Kota Pertama di Propinsi Sumatera Utara yang sukses melakukan Pengujian Sistem Informasi CMS (Cash Management System) berbasis web dan menjadi yang pertama di dalam mengimplementasikan CMS web di Propinsi Sumatera Utara.
24. Tahun 2020 BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) online dibangun dalam rangka memenuhi target kinerja koordinasi dan supervisi penegakan korupsi terintegrasi oleh KPK dimana Aplikasi BPHTB online berperan sebagai aplikasi layanan umum dalam hal pendapatan, penetapan dan monitoring pembayaran pajak daerah BPHTB yang terintegrasi dengan aplikasi Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Kementerian ATR-BPN.

Dari penjelasan tersebut diatas maka kinerja pelayanan yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

1. Mengerjakan penetapan dan menerbitkan SKPD – SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
2. Mengerjakan penetapan dan Menerbitkan SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan Perkotaan)
3. Mengerjakan permohonan keberatan SKPD – SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah – Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
4. Mengerjakan permohonan keberatan SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan Perkotaan)
5. Melakukan bimbingan dan Asisten penerapan standar akuntansi berbasis akrual
6. Melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan OPD
7. Menyusun laporan semesteran
8. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan permintaan GU
9. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan permintaan TU
10. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan permintaan GU NIHIL
11. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan permintaan TU NIHIL
12. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD
13. Menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
14. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
15. Menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
16. Menyusun DPA – OPD yang telah diteliti
17. Menyusun DPPA – OPD yang telah diteliti
18. Melaksanakan bimbingan, implementasi dan asistensi system informasi pengelolaan keuangan daerah
19. Menyusun RKA – OPD yang telah di teliti
20. Menyusun RKPA – OPD yang telah di teliti
21. Menerbitkan surat pentediaan dana (SPD)
22. Melakukan pencairan belanja langsung dan belanja tidak langsung
23. Menerbitkan belanja SP2D tidak langsung
24. Menerbitkan surat ketetapan penghentian pembayaran (SKPP)
25. Menerbitkan daftar gaji
26. Menerbitkan SP2D UP, GU dan TU
27. Menerbitkan SP2D LS tambahan penghasilan
28. Menerbitkan SP2D LS belanja barang/ jasa

29. Menerbitkan SP2D TU Nihil dan GU Nihil
30. Melaksanakan peningkatan manajemen asset/ barang daerah dengan menyusun buku induk inventaris kabupaten tapanuli selatan termasuk sensus asset/ barang daerah
31. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan asset/ barang/ milik daerah
32. Melakukan pengusulan penghapusan asset
33. Menyusun dokumen lakip OPD dan laporan untuk bahan LKPJ dan LPPD untuk KDH
34. Menyusun laporan keuangan akhir tahun OPD
35. Menyusun dokumen renja dan renstra OPD
36. Menyusun pelaporan keuangan penerimaan dan pengeluaran SKPD
37. Menyusun pelaporan keuangan pengeluaran dan subsidi, hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
38. Menyusun laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas
39. Menyusun dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta dokumen penting lainnya
40. Melaksanakan penyelenggaraan yang berhubungan dengan hukum, protokol dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan dinas
41. Melaksanakan pengkajian dan menganalisis beban kerja penyusunan Daftar Urut Kependidikan (DUK) pegawai
42. Melaksanakan persiapan kelengkapan administrasi pegawai meliputi mutasi, kenaikan pangkat, promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun,
43. Urusan karpeg, Karis/ Karsu dan kesejahteraan pegawai lainnya

Sedangkan untuk Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Permintaan Belanja Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa)
2. Pengajuan Permintaan Belanja Bunga Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan
3. Penetapan dan Penerbitan SKPD-SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
4. Penetapan dan Penerbitan SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan)
5. Permohonan Keberatan SKPD-SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
6. Permohonan Keberatan SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan)
7. Pengusulan Penghapusan Aset
8. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
9. Pencairan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
10. Penerbitan Belanja SP2D Tidak Langsung
11. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Pembayaran (SKPP)
12. Penerbitan Daftar Gaji
13. Penerbitan SP2D UP, GU dan TU
14. Penerbitan SP2D LS Tambahan Penghasilan
15. Penerbitan SP2D LS Belanja Modal dan Belanja Barang/ Jasa
16. Penerbitan SP2D TU Nihil dan GU Nihil
17. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan GU
18. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan TU
19. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan GU Nihil
20. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan TU Nihil

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelunasan pajak
2. Keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam hal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pihak-pihak terkait dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Selatan dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur
6. Penggunaan sistem dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang ada dalam pencapaian target Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Relatif masih terbatasnya jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lembaga yang mengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
2. Relatif masih kurangnya jumlah dan kapasitas aparatur bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan kerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Relatif masih kurangnya sarana prasarana penunjang kinerja bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

2.3.2 Tantangan dan Peluang untuk Meningkatkan Kinerja ke Depan

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak

sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dari segi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dimana Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan E-Budgeting dan keterbukaan publik melalui penyampaian informasi yang terarah dan tersistem.

2.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

Dalam pelaksanaan program kegiatan prioritas Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun yang direncanakan yaitu Tahun 2016-2020 yang disesuaikan dengan RPJMD, RKPD Renstra OPD, Renja OPD dan DPA OPD TA 2020 adalah sebagai berikut:

[illegible]

Kode	Program Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021	Program Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021	Program Berdasarkan RKPD Tahun 2016	Program Berdasarkan Renja Tahun 2016	Program Berdasarkan RKPD Tahun 2017	Program Berdasarkan Renja Tahun 2017	Program Berdasarkan RKPD Tahun 2018	Program Berdasarkan Renja Tahun 2018	Program Berdasarkan RKPD Tahun 2019	Program Berdasarkan Renja Tahun 2019	Program Berdasarkan RKPD Triwulan II 2020	Program Berdasarkan Renja Triwulan III 2020	Kode	Program Berdasarkan RKPD Triwulan III 2021	Program Berdasarkan Renja Triwulan III 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3.00.03 3.00.0 3.01.00 .07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan				
3.00.03 3.00.0 3.10.00 .15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Selatan terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Muatan RKPD :

- Rancangan kerangka peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Program prioritas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah; dan
- Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Nilai Strategis RKPD :

- Merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD.
- Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD.
- Memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS.
- Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggungjawab OPD.

Prioritas dan Sasaran dalam Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- Dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta kerangka pendanaan.
- Prioritas peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
- Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.

Kriteria Penentuan Prioritas dan Sasaran Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran OPD, seperti peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan sesuai standar dan pengelolaan dan pendataan aset daerah.
- Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD,
- Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Rencana Program Dan Kegiatan dalam Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.



Perubahan Rencana Kerja (P.Renca) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

33

No	Kode					Kategori Kegiatan Jumlah Kegiatan Detail (Kategori dan Detail)	Indikator Kinerja Program Detail (Kategori dan Detail)	Target Rencana Anggaran Daerah s/d Tahun 2021 (Jumlah dan Nilai Anggaran)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD s/d Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021										
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																				12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x100%										
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	5	02	01	2.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang/kali)	61	223.980.000	23	80.880.000		115.000.000									0%	0%	23	80.880.000	36%							
IV	5	02	01	2.06		Administrasi dan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	7.828.882.400	100	6.724.244.320	100	1.208.478.991	19	168.238.810	30	402.392.832	20	258.814.248			65	817.405.888	65%	68%	185	7.541.850.208	183%					
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Terpenuhi (bulan)	72	83.000.000	60	88.728.100	12	19.853.000	6	9.954.000			6	9.889.000			12	19.863.000	100%	100%	72	108.599.100	100%					
2	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (bulan)	72	2.041.474.000	80	2.688.984.599	12	97.803.301					24.705.000		12.450.000			3	37.155.000	25%	38%	63	2.736.039.599	38%				
3	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang tersedia (bulan)	72	145.000.000	80	261.592.000	12	34.474.800	3	6.484.000	3	6.493.500	3	8.411.000					25.379.100	75%	74%	69	286.971.100	96%				
4	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi (bulan)	72	365.908.400	90	487.840.350	12	115.739.600	3	22.272.500	3	22.923.700	3	30.807.900			9	75.804.100	75%	65%	69	563.644.450	96%					
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia (bulan)	510	175.000.000	299	137.784.500	12		3						9				75%	0%	260	137.784.500	51%					
							Jumlah makan tamu yang tersedia (kotak)	1500		60		250							90				36%	0%	150			1%					
							Jumlah snack siap yang tersedia (kotak)					100							60				100%	0%	100			0%					
5	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan blanko, karcis, formulir sebagai media bukti surat setoran atau surat pembayaran serta berbagai cetakan pelengkap administrasi lainnya yang terpenuhi (bulan)	72	865.000.000	80	623.289.285	12	177.813.300			10	135.137.500					10	135.137.500	83%	76%	70	758.436.765	97%					

No	Kode	Unsur/Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021										Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Peringkat Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 (%)					
				Indikator Kinerja Utama (IKU)					Indikator Kinerja Utama (IKU)											
				K	L	K	L	K	L	K	L	K	L							
2	5 02 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi telepon, internet, air dan listrik yang tersedia (bulan)	72	1.908.840.000	60	1.485.118.672	12	359.606.079	3	48.048.967	3	95.800.268	68	1.104.937.335	94%	85%	15=145 x100%		
4	5 02 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenaga pemenuh, tenaga katering dan konsumsi yang tersedia (bulan)	100	2.320.854.000	100	1.831.888.852	130	359.001.600	40	95.606.064	40	88.652.462	102	288.635.116	0%	0%			
VII	5 02 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	1.417.400.000	26	919.303.362	10	209.726.200	24	50.731.609	31	65.918.979	18	1.190.746.810	76%	77%			
2	5 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (bulan)	40	1.417.400.000	26	919.303.362	10	209.726.200	24	50.731.609	31	65.918.979	18	1.190.746.810	76%	77%			
3	5 02 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (bulan)	72	1.908.840.000	60	1.485.118.672	12	359.606.079	3	48.048.967	3	95.800.268	68	1.104.937.335	94%	85%	15=145 x100%		
4	5 02 01	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan dan peralatan yang tersedia (bulan)	264	751.624.000	96	516.014.400	12	30.000.000	12	1.100.000	12	217.100.300	108	705.714.890	41%	100%			
5	6 02 02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran	100	10.382.732.375	100	10.374.665.371	100	288.453.343.448	30	71.839.644.607	30	90.801.338.283	75	114.757.880.347	475	185.582.828.318	75%	719%	12 x 1%

[illegible]

No	Kode	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (outcome) (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Alokasi Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD dan Rencana PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD Tahun 2021 (Alokasi yang direvisi)		Matriks Indikator Kinerja Utama (Outcome)				Matriks Indikator Kinerja Utama (Outcome)			
				K	Rp	K	Rp	A	Rp	I		II		III		IV	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	5	02	02	03													
2	5	02	02	03													
3	5	02	02	07													
4	5	02	02	11													

No	Kode					Urutan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (PD) dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indikator) Kualitas (Output)	Target Kinerja Program Daerah (s.d Tahun 2021 (Maksimal Rencana Pembangunan Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Program PD dan Renja PD Tahun 2021 (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 (Anggaran yang direncanakan 2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (10 = 100% x 100%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (10 = 100% x 100%)							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV	K	Rp	12 = 12/10 x 100%	13 = 12/10 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
I																												
							Jumlah Pembayaran Nomor Penguji Gaji se kab TaspeI (daftar)				1								0		0%	0%						
							Jumlah Pembayaran Seloran Kelebihan Pembayaran Gaji (daftar)				1								0		0%	0%						
							Jumlah Pembayaran SP2D Gaji per OPD (daftar)				1								0		0%	0%						
							Jumlah Pembayaran Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (daftar)				1								0		0%	0%						
							Jumlah Pembayaran Tunjangan Hari Raya se Kab TaspeI (daftar)				1								0		0%	0%						
III	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	5.354.664.800	100	4.980.359.642	100	596.432.760	15	87.284.448	20	148.187.971	30	124.534.082	63	339.989.501	65%	58%	10	4.720.348.043	165%	100%	
1	5	02	02	2.02	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Bulanan (laporan)	12	375.000.000	10	343.297.722	12	71.214.400		9.220.400		28.203.900		7.400.000	0	44.824.300	0%	63%	10	368.122.022	83%	100%	
							Jumlah Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Semesteran (laporan)												0		0%							
							Jumlah Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan (laporan)				4								0		0%							
2	5	02	02	2.02	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen)	54	369.500.000	45	750.025.959	1	46.873.350		11.248.600		16.653.400	1	15.131.650	1	43.031.650	100 %	92%	46	793.057.609	85%	100%	

No	Kode	Uraian Kegiatan Program, Subprogram, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kualitas (Output) (Indikator)	Target Kinerja Perencanaan Daerah tahun 2021 (Akhir Periode Rencan Pencapaian)		Kendala dan Risiko Rencana PO dan RKA PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKA PD Tahun 2021 yang direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKA PD Tahun 2021								Target Kinerja Anggaran RKA PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKA PD tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKA PD Tahun 2021)		Target Kinerja Anggaran RKA PD Tahun 2021 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII			
3	5 02 02 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	36	5.148.143.700	10	1.872.047.970	1	185.922.900		11.523.500	1	32.449.400		42.361.500		86.339.400	100 %	46%		Rp	1.958.382.370	31%	
			Jumlah Peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD (Dokumen)					1								0		0%						
4	5 02 02 02 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah yang mengikuti pembinaan akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kota/Kabupaten (orang)	554	2.144.121.800	459	1.414.987.891	91	282.422.100	20	35.273.948	23	70.881.271	23	59.640.032		66	165.798.151	73%	55%	303	1.580.794.042	95%	100%
IV	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	222.184.000	100	333.273.921	100	288.970.871.999	6	5.727.162.779	23	77.670.461.984	35	90.591.648.795		85	173.989.273.558	68%	63%	165	174.322.547.478	165%	100%
1	5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah DPA- PPKD (dokumen)	72	322.184.000	60	333.273.921	1	246.454.513.000		5.727.162.779		77.670.461.984		90.591.648.795		0	173.989.273.558	0%	71%	60	174.322.547.479	65%	100%
			Jumlah DPPA- PPKD (dokumen)															0%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun-PPKD (dokumen)					12										0%						
			Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Bulanan (laporan)													0		0%						
			Jumlah RKA- PPKD (dokumen)					1								0		0%						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dasar menyusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Bupati Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor 570/KDST/2016 dan nomor 17/KPTS/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Raperda Pembentukan dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan diperkuat melalui Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

2.5.2 Proses Perencanaan Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Proses perencanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016–2021, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

2.5.3. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah masih kurang terutama fasilitas kantor yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dilingkungan kerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah antara lain Komputer, Laptop, penghancur kertas, mesin fotocopi dan Printer sehingga agak mengganggu proses pelayanan prima kepada masyarakat.

2.5.4. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang menghambat Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

- ❖ Kesadaran masyarakat yang kurang untuk membayar / memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan kepada masing-masing Wajib Pajak dan masih ada tidak transparannya pengusaha dalam melaporkan hasil usahanya.
- ❖ Sarana dan prasarana aparatur yang masih belum cukup menunjang dalam pemungutan objek pajak karena letak dan lokasi Objek Pajak yang jauh sehingga potensi objek pungutan baru yang potensial kurang tergali.
- ❖ Terbatasnya sarana dan perasarana kantor dan mobileur kantor seperti Komputer, Laptop, Printer dan Notebook serta ruangan sehingga sangat

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pegawai dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan OPD di Kab. Tapanuli Selatan

- ❖ Kurangnya sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebagai fasilitas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk peningkatan kinerja pegawai
- - ❖ terbatasnya jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Selatan sebagai lembaga yang mengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

b. Solusi/ Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Meningkatkan intensitas dan ekstensitas sumber-sumber pendapatan daerah dan menggali objek pungutan baru yang potensial
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prima
- 3) Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa mobileur kantor yang mencukupi untuk semua pegawai sehingga memperlancar pelaksanaan tugas pegawai dalam melaksanakan survey dan monitoring serta pelayanan kepada OPD di Kab. Tapanuli Selatan.
- 5) Tersedianya sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebagai fasilitas pegawai dalam melaksanakan survey dan monitoring serta untuk peningkatan kinerja pegawai.
- 6) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepada kepentingan publik dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah.
- 7) Penggunaan belanja daerah harus mengedepankan prinsip disiplin, efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.
- 8) Peningkatan penerapan dan penggunaan sistem dalam proses penganggaran hingga pelaporan keuangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

A. Program

Program Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Tapanuli Selatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai pada tabel 3.1

B. Kegiatan

Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Tapanuli Selatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai pada tabel 3.1

Dari uraian diatas, perlu dirumuskan dalam rencana program kerja Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan rencana program kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rumusan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				284.916.809.527		295.860.792.370	11.145.982.815
5.02	KEUANGAN				284.916.809.527		295.860.792.370	11.145.982.815
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100	23.813.766.387	100	25.681.873.421	1.868.107.034
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	108.806.200	100	148.389.600	39.583.400
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	3	52.275.550	3	89.062.950	36.787.400
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	10.103.100	1	10.103.100	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA (P.RKA)-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	10.103.150	1	10.103.150	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	7.638.800	1	10.434.800	2.796.000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	7.633.800	1	7.633.800	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	21.051.800	1	21.051.800	
		Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (laporan)		3		3		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100	21.317.425.508	100	23.109.411.041	1.791.985.533

Kode	Urusan/Sub/Bidang/Program/Kegiatan/Urutan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji ASN (bulan)	Tapanuli Selatan	14	20.797.418.808	14	22.505.964.141	-1.807.545.533
		Jumlah pembayaran tunjangan ASN (bulan)		12		12		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah gaji tenaga entry yang terbayar (OB)	Tapanuli Selatan	26	451.819.600	26	435.859.600	-15.960.000
		Jumlah honorarium PNS/ASN yang terbayar (OB)		144		144		
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah SPJ dan laporan realisasi anggaran bulanan SKPD yang tersusun (laporan)	Tapanuli Selatan	12	38.187.300	12	38.187.300	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100	129.700.000	100	129.700.000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk PNS yg tersedia (stell)	Tapanuli Selatan	49	14.700.000	49	14.700.000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang/kali)	Tapanuli Selatan	23	115.000.000	23	115.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	1.172.945.800	100	1.209.478.901	36.533.101
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (bulan)	Tapanuli Selatan	12	19.863.000	12	19.863.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	50.000.000	12	97.803.301	47.803.301
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	34.474.800	12	34.474.800	

Kode	Urusan/Sub-Bidang/PD/Program/Kegiatan/Urutan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi (bulan)	Tapanuli Selatan	12	115.739.600	12	115.789.600	
		Jumlah makanan dan minum tamu yang tersedia (bulan)		12		12		
		Jumlah makan tamu yang tersedia (kotak)		250		250		
		Jumlah snack rapat yang tersedia (kotak)		100		100		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan blanko, karcis, formulir sebagai media bukti surat setoran atau surat pembayaran serta berbagai cetakan pelengkap administrasi lainnya yang terpenuhi (bulan)	Tapanuli Selatan	12	189.083.500	12	177.813.300	(11.270.200)
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran surat kabar yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	27.540.000	12	27.540.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD luar daerah yang tersedia (OH)	Tapanuli Selatan	20	162.489.000	20	162.489.000	
		Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah yang tersedia (OH)		111		111		
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah operasional aplikasi penatausahaan keuangan daerah yang tersedia (aplikasi)	Tapanuli Selatan	8	573.755.900	8	573.755.900	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	150.000.000	100	150.000.000	
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia (paket)	Tapanuli Selatan	2	150.000.000	2	150.000.000	

Kode	Urutan/Sub/Bidang/PE/Program/Kegiatan/Urutan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	725.162.679	100	725.162.679	5.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran materai yang tersedia (buah)	Tapanuli Selatan	493	6.560.000	493	6.560.000	
		Jumlah pembayaran pengiriman surat/barang yang tersedia (Kg)		100		100		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi telepon, internet, air dan listrik yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	359.601.079	12	359.606.079	5.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan tenaga penjaga kantor yang tersedia (OB)	Tapanuli Selatan	130	359.001.600	130	359.001.600	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	209.726.200	100	209.726.200	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	165.000.000	12	165.000.000	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (unit)		4		4		
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	14.726.200	12	14.726.200	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan dan taman yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	30.000.000	12	30.000.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran		100	259.379.472.640	100	268.455.348.449	9.075.875.809

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran		100		100		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	585.470.500	100	585.470.500	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	14.480.700	47	14.480.700	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	13.998.800	47	13.998.800	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	25.353.300	47	25.353.300	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	14.524.200	47	14.524.200	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	224.781.300	1	224.781.300	
		Jumlah perbup tentang perubahan perbup penjabaran APBD (dokumen)		1		1		
		Jumlah perda tentang APBD (dokumen)		1		1		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran perubahan APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	197.869.100	1	197.869.100	
		Jumlah perbup tentang perubahan perbup penjabaran P. APBD (dokumen)		1		1		
		Jumlah perda tentang perubahan APBD (dokumen)		1		1		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah yang diberikan sosialisasi Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD (orang)	Tapanuli Selatan	135	15.035.200	135	15.035.200	

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah ke pemerintah atasan (kunjungan)	Tapanuli Selatan	3	21.386.200	3	21.386.200	
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah ke perangkat daerah (OPD)		45		45		
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah ke pemerintah atasan (kunjungan)	Tapanuli Selatan	10	58.041.700	10	58.041.700	
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah ke perangkat daerah (OPD)		45		45		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	312.479.000	100	312.473.600	-5.400
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan fungsional SKPD (berkas)	Tapanuli Selatan	45	22.998.900	45	22.998.900	
		Jumlah pengajuan SP2D bantuan (berkas)		1		1		
		Jumlah pengajuan SP2D LS BJ per SKPD (berkas)		45		45		
		Jumlah pengajuan SP2D TU, TU-NIHIL, GU, GU-NIHIL, TPP per SKPD (berkas)		45		45		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah laporan harian pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	39.995.400	12	39.990.000	-5.400
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah buku jurnal penerimaan/pengeluaran bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	159.990.900	12	159.990.900	
		Jumlah daftar register penerimaan/pengeluaran bulanan (laporan)		12		12		

Kode	Urusan/SubBidang/PD/Program/Kegiatan/Aktifitas Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran gaji Ke-13 se kab. tapsel (daftar)	Tapanuli Selatan	1	89.493.800	1	89.493.800	
		Jumlah pembayaran gaji se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran gaji susulan se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran gaji terusan se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan terusan se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran nomor pengujian gaji se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran setoran kelebihan pembayaran gaji (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran SP2D gaji per OPD (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran tunjangan hari raya se kab. tapsel (daftar)		1		1		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu		100	586.432.750	100	586.432.750	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	56.214.400	12	71.214.400	15.000.000
		Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah semesteran (laporan)		12		12		
		Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah triwulan (laporan)		4		4		

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	54.170.850	1	46.873.350	-7.297.500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	193.625.400	1	185.922.900	-7.702.500
		Jumlah peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dokumen)		1		1		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah yang mengikuti pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kota/kabupaten (orang)	Tapanuli Selatan	91	282.422.100	91	282.422.100	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	257.895.090.390	100	266.970.971.599	9.075.881.209
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah DPA-PPKD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	243.670.943.100	1	246.454.513.000	2.783.569.900
		Jumlah DPPA-PPKD (dokumen)		1		1		
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun-PPKD (dokumen)		1		1		
		Jumlah penyaluran bantuan keuangan bulanan (laporan)		12		12		
		Jumlah RKA-PPKD (dokumen)		1		1		
		Jumlah RKPA-PPKD (dokumen)		1		1		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana darurat dan mendesak bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	10.005.000.000	12	15.774.258.599	5.769.258.599
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	4.219.147.290	12	4.742.200.000	523.052.710
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah PP		WTP	646.105.700	WTP	756.005.700	311.899.972
		Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah		83		83		

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Laporan dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			646.105.700		756.005.700	109.900.000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan aset/barang milik daerah (laporan)	Tapanuli Selatan	6	99.992.100	6	99.992.100	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi barang milik daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	5	546.113.600	5	656.013.600	109.900.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		100	1.077.464.800	100	967.564.800	-109.900.000
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP		WTP		
		Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD		97		97		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.077.464.800		967.564.800	-109.900.000
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan piutang PAD (laporan)	Tapanuli Selatan	12	314.992.900	12	314.992.900	
		Jumlah penerbitan SPPT, SKPD dan SKRD terhadap target PAD (berkas)		11		11		
		Jumlah realisasi pendapatan asli daerah bulanan (laporan)		12		12		
5.02.04.2.01.01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah daftar harga zona nilai tanah per wilayah kecamatan (laporan)	Tapanuli Selatan	15	762.471.900	15	652.571.900	(109.900.000)
		Jumlah daftar NJOP PBB (buku)		1		1		
		Jumlah daftar objek pajak dan subjek pajak yang valid (daftar)		15		15		
		Jumlah hasil pembuatan dan pendetailan peta zona nilai tanah (laporan)		1		1		
Jumlah Total (Rp)					284.916.809.527		295.860.792.370	11.145.982.815

BAB IV

P E N U T U P

Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, maupun yang bersumber dari APBN, setelah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja-OPD), maka untuk tahap selanjutnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu membuat Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja-OPD). Selanjutnya pada tahap akhir adalah penyusunan Rencana Kerja Akhir.

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas dalam pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan prioritas yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Perubahan Renja TA 2021 dan setelah melalui verifikasi menjadi Penetapan Perubahan Renja TA 2021.

Dokumen Perubahan Renja TA 2021 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penyusunan program dan Kegiatan pada pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, setiap unit kerja harus mampu mengakomodir dan menjabarkan dokumen perencanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam bidang kewenangan masing-masing Dinas/ Instansi berdasarkan usulan-usulan dari bawah (Bottom Up) dan Bukan dari atas (Top Down).

Kebijakan, Indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan disusun untuk mencapai sasaran pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang terpercaya dan mempunyai kredibilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka *"Tapanuli Selatan Yang Maju, Sejahtera, sehat, Cerdas, Beriman, dan Mandiri*

Produktif dan Lestari". Hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Dokumen Strategi dan Prioritas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah melalui APBD Tahun 2021 masing-masing unit kerja khususnya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada akhirnya, berhasilnya keseluruhan penatausahaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah tergantung pada peran serta aparatur yang ada dan masyarakat serta OPD lain di lingkup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bentuk aktifitas dan kemandirian serta ditunjang oleh sikap mental, dedikasi, tekad dan semangat aparat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 ini adalah sebagai acuan kegiatan tahunan dimana setelah melalui evaluasi dan verifikasi.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 ini diharapkan semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok,

2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**


M. FRANANDA, SE
PEMBINA TK I
NIP. 19800723 200312 1 002